



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4505);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATU BARA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batu Bara.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

12. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderitanya hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
 - s. fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
 - t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Dalam hal pemenuhan Pelayanan Dasar pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya memiliki ketersediaan 1 (satu) jumlah mutu barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia pada setiap indikator kinerja pelayanan SPM.
- (3) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintahan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;

- c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, kegiatan, sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan, sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.

- (4) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhna pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 14

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 16

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Bupati Batu Bara;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;

- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Batu Bara;
 - e. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - 3. Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara;
 - 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara; dan
 - 6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Batu Bara;
 - b. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM di Kabupaten Batu Bara;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Batu Bara;
 - f. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Batu Bara dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - g. melakukan rapat secara berkala; dan
 - h. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu Tim Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

- (2) Sekretariat tim Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Laporan Penerapan SPM disampaikan Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Batu Bara melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara yang kemudian disampaikan Bupati menggunakan aplikasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Sumatera Utara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai sistem pelaporan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penerapan SPM di Kabupaten Batu Bara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Januari 2023
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh

Pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR, SE.,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IREAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 13 /TAHUN/2023
 TENTANG :
 PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, FORMAT TAHAPAN PENERAPAN
 DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|----|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | |
| 1. | Pendidikan Dasar Usia Dini | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | Persentase capaian mutu 100% |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 . Buku gambar | | | | |
| | 2 . Alat mewarnai | | | | |
| | 3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik | | | | |
| | 4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | 5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 2. | Pendidikan Dasar | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00% |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Buku teks pelajaran | | | | |
| | 2 . Perlengkapan belajar | | | | |
| | 3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | 4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | | | |
| | 5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | | | | |
| | 6 . Penyediaan biaya personil peserta didik | | | | |
| | 7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | 8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00% |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Modul belajar | | | | |
| | 2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | | | | |
| | 3 . Penyediaan biaya personil peserta didik | | | | |
| | 4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | 5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | | | | |
| | 6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | | | | |
| | 7 . Perlengkapan belajar | | | | |
| | 8 . PKBM Terakreditasi minimal C | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | | |
| 1 . Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) | | | | |
| | 2 . Tablet tambah darah | | | | |
| | 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin | | | | |
| | 4 . Kartu ibu/rekam medis ibu | | | | |
| | 5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | | | | |
| | 6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan | | | | |
| | 7 . Bidan | | | | |
| | 8 . Perawat | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 2 . Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Formulir Partograf | | | | |
| | 2 . Kartu ibu (rekam medis) | | | | |
| | 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | | | | |
| | 4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | | | | |
| | 5 . Bidan | | | | |
| | 6 . Perawat | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 3 . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Vaksin Hepatitis B0 | | | | |
| | 2 . Vitamin K1 injeksi | | | | |
| | 3 . Salep/tetes mata antibiotik | | | | |
| | 4 . Formulir bayi baru lahir | | | | |
| | 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | | | | |
| | 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | | | | |
| | 7 . Dokter/dokter spesialis Anak | | | | |
| | 8 . Bidan | | | | |
| | 9 . Perawat | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 4 . Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | | | | |
| | 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) | | | | |
| | 3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) | | | | |
| | 4 . Vitamin A Biru | | | | |
| | 5 . Vitamin A Merah | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|---|--|
| | 6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella | | | | |
| | 7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella | | | | |
| | 8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) | | | | |
| | 9 . Peralatan Anafilaktik | | | | |
| | 10 . Bidan | | | | |
| | 11 . Dokter | | | | |
| | 12 . Perawat | | | | |
| | 13 . Ahli Gizi | | | | |
| | 14 . Guru PAUD | | | | |
| | 15 . Kader Kesehatan | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 5 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Buku raport kesehatanku | | | | |
| | 2 . Buku pemantauan kesehatan | | | | |
| | 3 . Kuesioner skrining kesehatan | | | | |
| | 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | | | | |
| | 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah | | | | |
| | 6 . Dokter/Dokter gigi | | | | |
| | 7 . Bidan | | | | |
| | 8 . Perawat | | | | |
| | 9 . Ahli Gizi | | | | |
| | 10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | 11 . Guru | | | | |
| | 12 . Kader Kesehatan | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 6 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | | |
| | 2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes | | | | |
| | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | | | | |
| | 4 . Dokter | | | | |
| | 5 . Bidan | | | | |
| | 6 . Perawat | | | | |
| | 7 . Ahli Gizi | | | | |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 7 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol | | | | |
| | 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| | 3 . Buku kesehatan lansia | | | | |
| | 4 . Dokter | | | | |
| | 5 . Bidan | | | | |
| | 6 . Perawat | | | | |
| | 7 . Ahli Gizi | | | | |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 8 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | | |
| | 2 . Tensimeter | | | | |
| | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | | | | |
| | 4 . Dokter | | | | |
| | 5 . Bidan | | | | |
| | 6 . Perawat | | | | |
| | 7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 9 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet | | | | |
| | 2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | | | | |
| | 3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | | |
| | 4 . Dokter | | | | |
| | 5 . Bidan | | | | |
| | 6 . Perawat | | | | |
| | 7 . Ahli Gizi | | | | |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 10 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |

| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
|-------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| | 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | | | | |
| | 2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi | | | | |
| | 3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan | | | | |
| | 4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | | |
| | 5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 11 . | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | | | | |
| | 2 . Reagen Zn TB | | | | |
| | 3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 | | | | |
| | 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering | | | | |
| | 5 . Catridge tes cepat molekuler | | | | |
| | 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan | | | | |
| | 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | | | | |
| | 8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru | | | | |
| | 9 . Perawat | | | | |
| | 10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | | | | |
| | 11 . Penata Rontgen | | | | |
| | 12 . Tenaga kesehatan masyarakat | | | | |
| | 13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 12 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) | | | | |
| | 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama | | | | |
| | 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | | | | |
| | 4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | | | | |
| | 5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin | | | | |
| | 6 . Perawat | | | | |
| | 7 . Bidan | | | | |
| | 8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) | | | | |
| | 9 . Tenaga kesehatan masyarakat | | | | |
| | 10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|-----|---|---|------------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | |
| 1 . | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | | | | |
| | 2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) | | | | |
| | 3 . Jaringan perpipaan | | | | |
| | 4 . Jaringan bukan perpipaan | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 2 . | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik | | | | |
| | 2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik | | | | |
| | 3 . Sub-Sistem pengolahan setempat | | | | |
| | 4 . Sub-sistem pengangkutan | | | | |
| | 5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) | | | | |
| | 6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL) | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | |
| 1. | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Tidak Terjadi Bencana | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 8 | 8 | 0 | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana | | | | |
| | 2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | | | | |
| | 3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana | | | | |
| | 4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 2. | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 0 | 0 | 0 | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 0 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan | | | | |
| | 0 . Subsidi uang sewa | | | | |
| | 0 . Penyediaan rumah layak huni | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|
| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | | |
| 1 . | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | | | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | | | | |
| | 2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | | | | |
| | 3 . Standar operasional prosedur Satpol PP | | | | |
| | 4 . Standar sarana prasarana Satpol PP | | | | |
| | 5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | | | | |
| | 6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | | | | |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | | |
| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | | |
| KEBENCANAAN | | | | | |
| 1 . | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | | | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | | | | |
| | 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | | | | |
| | 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | | | | |
| | 4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana | | | | |
| | 5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana | | | | |
| | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) | | | | |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | | | | |
| | Ya Terjadi Bencana | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | | | | |
| | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | | | | |
| | 3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana | | | | |
| | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas | | | | |
| | 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | | | | |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | | | | |
| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | Total Pencapaian | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | | | | |
| 1. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi | | | | |
| | 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | | | | |
| | 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | | | | |
| | 4 . Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|----|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | | | | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | | | | |
| | 3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | | | | |
| | 4 . Penyediaan permakanan | | | | |
| | 5 . Penyediaan sandang | | | | |
| | 6 . Penyediaan alat bantu | | | | |
| | 7 . Penyediaan perbekalan kesehatan | | | | |
| | 8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | | | | |
| | 9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar | | | | |
| | 10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | | | | |
| | 11 . Akses ke layanan pendidikan | | | | |
| | 12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | | | | |
| | 13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | | | | |
| | 14 . Layanan rujukan | | | | |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | | | | |
| | 2 . Penyediaan permakanan | | | | |
| | 3 . Penyediaan sandang | | | | |
| | 4 . Penyediaan alat bantu | | | | |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan | | | | |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | | | | |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---|--|--|--|
| | 8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | | | | |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan | | | | |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | | | | |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | | | | |
| | 12 . Layanan rujukan | | | | |
| | 13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | | | | |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | | | | |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | | | | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | | | | |
| | 3 . Penyediaan permakanan | | | | |
| | 4 . Penyediaan sandang | | | | |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | | | | |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | | | | |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | | | | |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | | | | |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | | | | |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | | | | |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | | | | |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | | | | |
| | 13 . Layanan rujukan | | | | |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | | | | |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| | JUMLAH | | | | |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | | | | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | | | | |
| | 3 . Penyediaan permakanan | | | | |
| | 4 . Penyediaan sandang | | | | |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | | | | |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | | | | |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | | | | |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar | | | | |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak | | | | |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | | | | |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | | | | |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | | | | |
| | 13 . Layanan rujukan | | | | |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | | | | |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | | | | |
| | JUMLAH | | | | |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani 1 | Jumlah yang terlayani 2 | Jumlah yang belum terlayani 3 | |
| | 1 . Penyediaan permakanan | | | | |
| | 2 . Penyediaan sandang | | | | |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | | | | |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | | | | |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

B. Format Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABUPATEN/KOTA

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN/KOTA

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

- FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

1) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

- FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA
- FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
- FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)
- FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN
- FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
- FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

- FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
- FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

- FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI
- FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI
- FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI

E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)

- FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

- FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS
- FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

- FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
- FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

- FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI KABUPATEN/KOTA
- FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR LUAR PANTI
- FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR LUAR PANTI

- FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA LUAR PANTI

- FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

- REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI KABUPATEN KOTA :

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

- FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN/KOTA:

| No | JENIS PELAYANAN DASAR | ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/SEDERAJAT | | ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A | | ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B. | | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN | | PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 | |
|----|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL | JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5- 6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN | JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A | JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN | JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B | JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN | JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH | JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN | PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH | PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA) | | | | | | | | | | |
| 2 | Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan) | | | | | | | | | | |

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
- Kolom 4 : Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 5 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
- Kolom 6 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 7 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
- Kolom 8 : jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 9 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
- Kolom 10 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah
- Kolom 12 : proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN/KOTA:

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B | | PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV | | RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD | |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| | | JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B | JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT | PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N | PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1 | JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL | JUMLAH SATUAN PAUD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | |

- Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
- Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut
- Kolom 5 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N
- Kolom 6 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
- Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA :

| NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN | SELISIH (+/-) | HARGA SATUAN | KEBUTUHAN BIAYA | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------|--|--------|--|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8-9 | 11 | 12 | | |
| 1 | Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini | % penduduk usia 5 - 6 tahun | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD | 1 | Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun | 1 | Tersedianya data | Peserta didik | | | | | |
| | | | | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun | 2 | Terselenggaranya sosialisasi | Kegiatan | | | | | |
| | | | | 3 | Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | 3 | Biaya bantuan pendidikan | Peserta didik | | | | | |
| | | | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa | 4 | Peserta didik terlayani | Peserta didik | | | | | |
| | | | | 5 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | 5 | Peserta didik terlayani | Peserta didik | | | | | |
| | | | | 6 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | 6 | Peserta didik terlayani | Peserta didik | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan | 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | 1 | Terselenggaranya pendampingan | Kegiatan | | | | | |
| | | | | 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | 2 | Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya | Kegiatan | | | | | |
| | | | | 3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | 3 | Terselenggaranya Sosialisasi | Kegiatan | | | | | |
| | | | | 4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 4 | Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana | Kegiatan | | | | | |
| | | | | 5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak | 5 | Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan | Kegiatan | | | | | |
| | | | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 1 | Tersedianya data | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | |
| | | | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | 2 | Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 3 | Ajukan formasi guru | Guru | | | | | | | |
| | | | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | 4 | Penempatan guru pembimbing khusus | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | 5 | Penempatan kepala sekolah | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | 6 | Penempatan pengawas sekolah | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini | 7 | Tersedianya data | Pengawas atau penilik | | | | | | | |
| | | | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | |
| | | | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | 3 | Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan | Kegiatan | | | | | | | |
| 2 | Program SPM Pendidikan Dasar | % penduduk usia 7-15 tahun | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | 1 | Tersedianya data | Peserta didik | | | | | | | |
| | | | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | 2 | Bantuan biaya pendidikan | Peserta didik | | | | | | | |
| | | | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | 3 | Peserta didik terlayani | Peserta didik | | | | | | | |
| | | | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | 4 | Peserta didik terlayani | Peserta didik | | | | | | | |
| | | | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | 1 | Terselenggaranya komunitas belajar | Unit komunitas | | | | | | | |
| | | | | 2 | Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | 2 | Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | 1 | Terselenggaranya pendampingan | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 2 | Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana | Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | 3 | Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan | Kegiatan | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | 4 | Terselenggaranya sosialisasi | Kegiatan | | | | | | |
| | | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Pa ket A/Paket B) | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | 1 | Tersedianya data | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | |
| | | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | 2 | Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | |
| | | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 3 | Ajukan formasi guru | Guru | | | | | | |
| | | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Pa ket A/Paket B) | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | 4 | Penempatan guru pembimbing khusus | Kegiatan | | | | | | |
| | | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | 5 | Penempatan kepala sekolah | Kegiatan | | | | | | |
| | | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | 6 | Penempatan pengawas sekolah | Kegiatan | | | | | | |
| | | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | 7 | Tersedianya data | Pengawas | | | | | | |
| | | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Kegiatan | | | | | | |
| | | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | |
| | | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | 3 | Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan | Kegiatan | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 | Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan) | Peserta didik | | | | | | | | | | | |
| 25 | Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan) | Peserta didik | | | | | | | | | | | |
| 26 | Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Unit komunitas | | | | | | | | | | | |
| 27 | Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 28 | Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundangan kekerasan pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 29 | Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 30 | jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 31 | Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 32 | Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | |
| 33 | Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | |
| 34 | Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Guru | | | | | | | | | | | |
| 35 | Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 36 | Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 37 | Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 38 | Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Pengawas atau penilik | | | | | | | | | | | |
| 39 | Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 40 | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | |
| 41 | Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan) | Kegiatan | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Keluaran (output)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

| NO. | JENIS LAYANAN DASAR | CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) | | | CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|-----|---------------------------|---|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| | | JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH | JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | |
| 2 | Pendidikan Dasar | | | | | | | | |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua) Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

| NO | KECAMATAN | DESA /KELURAHAN | TARGET PENERIMA PELAYANAN | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL | PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN | PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR | PELAYANAN KESEHATAN BALITA | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT | PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI | PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS | PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT | PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBER KULOSIS | PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

+ TAMBAH

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

| NO | KECAMATAN | PELAYANAN KESEHATAN | | SDM KESEHATAN | |
|----|-----------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | FASILITAS | KETERSEDIAAN | JENIS | KETERSEDIAAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

+ TAMBAH

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

| NO | JENIS LAYANAN DASAR | BARANG | JUMLAH KEBUTUHAN | JUMLAH TERSEDIA | SELISIH | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis | | | | | | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

| NO | JENIS LAYANAN DASAR | JENIS SDM KESEHATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JUMLAH TERSEDIA | SELISIH | KETERANGAN |
|----|--|---------------------|------------------|-----------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis | | | | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

**FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :**

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N) | | | PENDANAAN (TAHUN N) | | | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|-----|--|--|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | PERSENTASE REALISASI ANGGARAN | SUMBER DANA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | | | | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis | | | | | | | | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n

Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%

Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%

Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota

Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA :

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA) | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|-----|--|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | |
| 6 | Produktif | | | | | | | | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | | | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis | | | | | | | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar

Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar

Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100

Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)

Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | UNIT AIR BAKU | | | | UNIT PRODUKSI | | UNIT PELAYANAN | KONDISI | | |
|-----|-----------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | JENIS SUMBER AIR | NAMA SUMBER | LOKASI UNIT AIR BAKU | KAPASITAS INTAKE (liter/detik) | KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik) | IDLE CAPACITY (liter/detik) | PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM | BEROPERASI | KUANTITAS | KUALITAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll

Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku

Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku

Kolom 7 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik

Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 9 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada

Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | NAMA SPALD | LOKASI SPALD | KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI) | WILAYAH PELAYANAN | | AKSES | | | |
|-----|------------|--------------|---|-------------------|-----------------|-----------|----|---------------|----|
| | | | | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | TERSEDIA | | TERMANFAATKAN | |
| | | | | | | (m3/hari) | KK | (m3/hari) | KK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
- Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD
- Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | RW | RT | NAMA KEPALA KELUARGA | NIK | JUMLAH ANGGOTA RUMAH | KONDISI EKONOMI KELUARGA | | SUDAH TERLAYANI | | BELUM TERLAYANI | JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH | |
|-------|-----------|----------------|----|----|----------------------|-----|----------------------|--------------------------|---------|-----------------|-----|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | MBR | NON MBR | JP | BJP | | > 10 M | < 10 M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA :

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET | SATUAN | RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1 | | OPD PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|--------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | LOKASI | ALOKASI DANA (RP) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota | 1 | % | 1 | 1 | 1 |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota | 2 | % | 2 | 2 | 2 |
| | | Sub kegiatan 1 | Indikator Sub Kegiatan 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| | | Sub kegiatan 2 | Indikator Sub Kegiatan 2 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| | | Sub kegiatan 3 | Indikator Sub Kegiatan 3 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| | | dst | dst | 6 | | 6 | 6 | 6 |

KETERANGAN:

- Kolom 1
- Kolom 2
- Kolom 3
- Kolom 4
- Kolom 5
- Kolom 6
- Kolom 7
- Kolom 8

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA :

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET | SATUAN | RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1 | | OPD PELAKSANA |
|----|---------------------------------------|---|---|--------|--------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | LOKASI | ALOKASI DANA (RP) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| | Penyediaan Pelayanan Pemolahan Limbah | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota | | % | | | |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota | | % | | | |
| | | Sub kegiatan 1 | Indikator Sub Kegiatan 1 | | | | | |
| | | Sub kegiatan 2 | Indikator Sub Kegiatan 2 | | | | | |
| | | Sub kegiatan 3 | Indikator Sub Kegiatan 3 | | | | | |
| | | dst | dst | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1
- Kolom 2
- Kolom 3
- Kolom 4
- Kolom 5
- Kolom 6
- Kolom 7
- Kolom 8

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KECAMATAN | DESA | TARGET | | | | REALISASI | | | | |
|----------|-----------|------|--------|--|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | TOTAL | AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN | AKSES AMAN SPALD-S | AKSES AMAN SPALD- T | TANPA AKSES | AKSES DASAR | AKSES LAYAK | AKSES AMAN SPALD-S | AKSES AMAN SPALD-T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total *) | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA:

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA | REALISASI | | |
|----|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | | | | |

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA:

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA | REALISASI | | |
|----|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | | | | |

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman SPALD-T)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

| NO. | JENIS BENCANA | TAHUN TERJADINYA BENCANA | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | JUMLAH RUMAH RUSAK | TINGKAT KERUSAKAN RUMAH | | | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | | |
|-----|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------|---------|
| | | | | | | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | MILIK | SEWA | LAINNYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS RELOKASI PROGRAM | KECAMATAN | KELURAHAN/D ESA | RW | RT | JUMLAH RUMAH TERDAMPAK | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA | KONDISI EKONOMI KELUARGA | | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | | SUDAH TERLAYANI | | | BELUM TERLAYANI |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|----|----|------------------------|-----------|-------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | MBR | NON MBR | LEGAL | ILEGAL | GANTI ASET | SUBSIDI SEWA | PENYEDIAAN RLH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Daerah Rawan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total *) | | | | | | | | | | | | | | | | |

KET

- Kolom 1 Diisi nomor urut
- Kolom 2 Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:
 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 Diisi nomor RW
- Kolom 6 Diisi nomor RT
- Kolom 7 Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8 Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9 Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10 Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13 Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14 Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15 Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16 Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17 Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

| NO. | JENIS BENCANA | TAHUN TERJADINYA BENCANA | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | RW | RT | JALAN DAN NO. RUMAH | NAMA KEPALA KELUARGA | NIK | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | KONDISI EKONOMI KELUARGA | | TINGKAT KERUSAKAN RUMAH | | | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | | | KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN | | | | BELUM TERLAYANI | RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM |
|----------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|----|----|---------------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------|---------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | MBR | NON MBR | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | MILIK | SEWA | LAINNYA | REHABILITASI | PEMBANGUNAN KEMBALI | SUBSIDI UANG SEWA | RELOKASI PEMBANGUNAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 Diisi nomor urut
- Kolom 2 Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 Diisi nomor RW
- Kolom 7 Diisi nomor RT
- Kolom 8 Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 9 Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 10 Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 11 Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 12 Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 13 Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 14 Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 15 Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 16 Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 17 Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 18 Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 19 Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 20 Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 21 Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 22 Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 23 Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
- Kolom 24 Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 25 Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | |
|-----|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Pengumpulan Data | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana | Survei Sekunder | Rp (Sub Total) |
| | | 1. Data Wilayah Administrasi Penanganan | Orang*Hari |
| | | 2. Identifikasi melalui citra satelit | Orang*Hari |
| | | Survei Primer | Rp (Sub Total) |
| | | 1. Pemetaan | Orang*Hari |
| | | 2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Survei Sekunder |
| | 2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | 1. Data aset lahan pemda | Orang*Hari |
| | | 2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW | Orang*Hari |
| | | Survei Primer | Rp (Sub Total) |
| | | 1. Pemetaan | Orang*Hari |
| | 3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani | Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani | Rp (Sub Total) |
| | 4. Pendataan rumah sewa | Survei Primer | Rp (Sub Total) |
| B. | Sosialisasi | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana | Transportasi | Orang*kali |
| | | Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Penggandaan Materi Pelatihan | Eks |
| | | ATK | LS |
| | | Narasumber | Orang*kali |
| C. | Pembentukan Tim Satgas | | Rp (Biaya C1) |
| | 1. Pelatihan Tim Satgas | Diklat | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |
| | | Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Penggandaan Materi Pelatihan | Eks |
| | | ATK | LS |
| | | Pelatih/Praktisi | Orang*kali |
| D. | Pendataan Cepat | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pengisian Form A dan B | Surveyor | Orang*Hari |
| | | Penggandaan Form | Eks |
| | | Pengolahan Data | Orang*Hari |
| E. | Verifikasi penerima layanan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM | Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |

| | | Penggandaan Materi | Eks |
|-----|--|--|------------------------|
| F. | Penyusunan Rencana Aksi | | Rp (Biaya F1) |
| | 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati | Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| NO. | KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN BIAYA (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Penerima dan jenis pelayanan | Transportasi | Orang*kali |
| | | Penggandaan Materi | Eks |
| | | ATK | LS |
| G. | Rehabilitasi Rumah | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator | Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur | Orang*bulan |
| | 2. Pelatihan fasilitator | Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Pelatih/Praktisi | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |
| | | Penggandaan Materi | Eks |
| | 3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah | Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB | Rp |
| H. | Pembangunan Kembali | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator | Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur | Orang*bulan |
| | 2. Pelatihan fasilitator | Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Pelatih/Praktisi | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |
| | | Penggandaan Materi | Eks |
| | 3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana | Rembug Desa | Rp (Sub Total) |
| | | 1. Media diskusi | Rp |
| | | 2. Transportasi | Orang*Hari |
| | 4. Pembangunan Rumah | 3. Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB | Rp |
| I. | Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pengadaan Lahan | Pembebasan Lahan | Rp |
| | 2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni | Rembug Warga | Rp (Sub Total) |
| | | 1. Media diskusi | Rp |
| | | 2. Transportasi | Orang*Hari |
| | | 3. Konsumsi Rapat | Orang*kali |
| | | Tenaga Ahli | |
| | | 1. Tenaga Ahli Perencana | Orang*bulan |
| | | 2. Tenaga Ahli Arsitektur | Orang*bulan |
| | | 3. Tenaga Ahli Teknik Sipil | Orang*bulan |
| | | 4. Tenaga Ahli ME | Orang*bulan |
| | 5. Tenaga Ahli Plumbing | Orang*bulan | |

| | | | |
|----------|---|--|------------------------|
| | 3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU | Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB | Rp |
| J. | Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM | Pembahasan (paket meeting) | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |
| | | Praktisi/Narasumber | Orang*kali |
| | | Penggandaan dokumen laporan | Eks |
| NO. | KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN BIAYA (Rp) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| K. | Pembinaan Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota. | Pembahasan (paket meeting) | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |
| | | Praktisi/Narasumber | Orang*kali |
| | | Penggandaan dokumen laporan | Eks |
| L. | Pemantauan Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Perangkat Pemantauan SPM | Pengadaan sistem informasi | Rp |
| | 2. Pemantauan kinerja penerapan SPM | Operator Pelaksana Update Data Kinerja | Orang*kali |
| | | Survei lapangan | Orang*kali |
| M. | Evaluasi Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Rapat evaluasi penerapan | Pembahasan (paket meeting) | Orang*kali |
| | | Transportasi | Orang*kali |
| | | Praktisi/Narasumber | Orang*kali |
| | | Penggandaan dokumen laporan | Eks |

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN/KOTA :

| NO. | JENIS RELOKASI PROGRAM | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | RW | RT | NAMA KEPALA KELUARGA | NIK | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | KONDISI EKONOMI KELUARGA | | LUAS BANGUNAN (M ²) | LUAS TANAH (M ²) | LEGALITAS TANAH | | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | | | KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN | | |
|-----|------------------------|-----------|-----------------|----|----|----------------------|-----|-------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|------|---------|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | MBR | NON MBR | | | LEGAL | ILEGAL | MILIK | SEWA | LAINNYA | GANTI ASET | SUBSIDI SEWA | PENYEDIAAN RLH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | Daerah Rawan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga

Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m²

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan RLH

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN BIAYA (Rp) |
|-----|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengumpulan Data | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya | Survey sekunder | |
| | | Pengadaan Peta | Rp |
| | | Survey primer | |
| | | Pengambilan Data Lapangan | Orang*Hari |
| | 2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman | Survey sekunder | |
| | | Pengadaan Peta | Rp |
| | | Survey primer | |
| | | Pengambilan Data Lapangan | Orang*Hari |
| | 3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting | Survey sekunder | |
| | | Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) | Rp |
| | | Survey primer | |
| | | Pengambilan Data Lapangan | Orang*Hari |
| | 4. Pengolahan Data | Tenaga Pengolah Data | |
| | | Tenaga Ahli Geografi/Geodesi | Orang*Bln |
| | | Tenaga Ahli Statistik | Orang*Bln |
| 2 | Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat | Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Paket meeting | Orang*Kali |
| | 2. Rapat Sinkronisasi dokumen | Paket meeting | Orang*Kali |
| 3 | Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi | Penyelenggaraan Sosialisasi | |
| | | Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) | Eks |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 2. Sosialisasi tentang layanan SPM | Penyelenggaraan Sosialisasi | |
| | | Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) | Eks |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| 4 | Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Identifikasi | |
| | | Penggandaan Formulir | Eks |
| | | ATK | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 2. Penyusunan dokumen perencanaan | Rembug Warga | |
| | | Media diskusi | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | | Penggandaan dokumen | |
| | | Penggandaan dokumen | Eks |
| 5 | Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan | Penyelenggaraan Verifikasi | |
| | | Penggandaan Formulir | Eks |
| | | ATK | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan | Penyelenggaraan Sosialisasi | |
| | | Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) | Eks |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti | Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti | |
| | | Tenaga Ahli Jasa Appraisal | Orang*Bln |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP | Penyelenggaraan Sosialisasi | |
| | | Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) | Eks |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| 6 | Subsidi Uang Sewa | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa | Penyelenggaraan Verifikasi | |
| | | Penggandaan Formulir | Eks |
| | | ATK | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni | Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni | |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| | 3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa | Penyaluran Subsidi Uang Sewa | |
| | | Total Subsidi Uang Sewa | Rp |
| | | Penggandaan dokumen | Eks |
| 7 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni | Penyelenggaraan Verifikasi | |
| | | Penggandaan Formulir | Eks |
| | | ATK | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | 2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU | Rembug Warga | |
| | | Media diskusi | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | | Konsumsi | Orang*Kali |
| | | Tenaga Ahli | |
| | | Tenaga Ahli Perencana | Orang*Bln |
| | | Tenaga Ahli Arsitektur | Orang*Bln |
| | | Tenaga Ahli Teknik Sipil | Orang*Bln |
| | 3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Tenaga Ahli ME | Orang*Bln |
| | | Tenaga Ahli Plumbing | Orang*Bln |
| | | Rembug Warga | |
| | | Media diskusi | Rp |
| | | Transportasi | Orang*Hari |
| | 4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU | Konsumsi | Orang*Kali |
| Pembangunan fisik Rumah Susun | | | |
| Biaya konstruksi | | Rp | |
| Biaya MK | | Rp | |
| 5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus | | Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah | |
| | Pemeliharaan bangunan dan lingkungan | BOP*Bln | |
| | Penggandaan dokumen | Eks | |
| 8 | Pelaporan Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM | Pembahasan (Paket meeting) | Orang*Kali |
| | | Penggandaan dokumen laporan | Eks |
| 9 | Pembinaan Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat. | Penyelenggaraan Pembinaan | |
| | | Pembahasan (Paket meeting) | Orang*Kali |
| | | Penggandaan dokumen laporan | Eks |
| | | Praktisi/ Narasumber | Orang*Kali |
| 10 | Pemantauan Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Perangkat Pemantauan SPM | Pengadaan sistem informasi | Rp |
| | 2. Pemantauan kinerja penerapan SPM | Operator pelaksana update data kinerja | Orang*Kali |
| | | Survei lapangan | Orang*Kali |
| 11 | Evaluasi Penerapan SPM | | Rp (Sub Total) |
| | 1. Evaluasi Penerapan | Pembahasan (Paket meeting) | Orang*Kali |
| | | Penggandaan Materi | Eks |
| | | Narasumber | Orang*Kali |

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KEGIATAN LAYANAN | JUMLAH RUMAH TANGGA | KEBUTUHAN BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | TAHUN KE-1 | | | TAHUN KE 2 | | | TAHUN KE 3 | | | |
| | | | | APBD | DAK | LAINNYA | APBD | DAK | LAINNYA | APBD | DAK | LAINNYA | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | |
| 1 | Rehabilitasi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan kembali | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyediaan rumah relokasi | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengadaan lahan | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pembangunan baru | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah *) | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 Diisi nomor urut
- Kolom 2 Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23
- Kolom 3 Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | KEGIATAN LAYANAN | JUMLAH RUMAH TANGGA | KEBUTUHAN BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN | | |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | TAHUN N+1 | | |
| | | | | APBD | DAK | LAINNYA |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan | | | | | |
| 2 | Subsidi uang sewa | | | | | |
| 3 | Penyediaan rumah layak huni | | | | | |
| Jumlah *) | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
 Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
 Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
 Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
 Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
 *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

| NO. | JENIS BENCANA | TAHUN TERJADINYA BENCANA | KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | TINGKAT KERUSAKAN RUMAH | | | | TARGET | | | | REALISASI | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | TOTAL | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | REHABILITASI | PEMBANGUNAN KEMBALI | RELOKASI | SUBSIDI UANG SEWA | REHABILITASI | PEMBANGUNAN KEMBALI | RELOKASI | SUBSIDI UANG SEWA | BELUM TERLAYANI | |
| | | | | | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase layanan **) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian SPM Total ***) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN :

- Kol : Diisi nomor urut
- Kol : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- om : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kol : Diisi nama Kecamatan
- Kol : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kol : Diisi total rumah rusak
- Kol : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
- Kol : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
- Kol : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
- Kol : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kol : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kol : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
- Kol : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kol : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kol : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kol : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
- Kol : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kol : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA :

| NO. | JENIS RELOKASI PROGRAM | KECAMATAN | DESA | TARG ET | | | | REALIS ASI | | | | |
|----------|---|-----------|------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | TOTAL | GANTI ASET | SUBSIDI SEWA | PENYEDIAAN RLH | GANTI ASET | SUBSIDI SEWA | PENYEDIAAN RLH | BELUM TERLAYANI | |
| | | | | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - | | | | | | | | | | | |
| 2 | Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - | | | | | | | | | | | |
| 3 | Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Hidro | | | | | | | | | | | |
| 4 | Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - | | | | | | | | | | | |
| 5 | Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - | | | | | | | | | | | |
| 6 | Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - | | | | | | | | | | | |
| 7 | Relokasi perumahan di atas lahan | | | | | | | | | | | |
| Total *) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan **) | | | | | | | | |
| | | | | Capaian SPM Total ***) | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolo : Diisi nomor urut
- Kolo : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
- Kolo : Diisi nama Kecamatan
- Kolo : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolo : Diisi total rumah yang terkena relokasi program
- Kolo : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
- Kolo : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
- Kolo : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolo : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
- Kolo : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
- Kolo : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolo : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA:

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | REALISASI | | |
|----------|--|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana | | | | |
| | Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah | | | | |

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS | KENDALA | KETERANGAN |
|-----|--|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penegakan Peraturan Daerah/ Perkada | 1. Pembongkaran Portal 2. Pengembalian fungsi Trotoar | | Permendagri No 54 /2011 |
| 2 | Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pembinaan dan Penyuluhan) | | | Pada saan ini kami sedang menyusun Permendagri ttg Kode Etik |
| 3 | Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | | | yang memuat ttg SOP - Deteksi Dini dan Cegah Dini |
| 4 | Pengawalan pejabat/orang-orang penting | | | - Pembinaan dan Penyuluhan - Pengamanan |
| 5 | Pengamanan tempat-tempat penting | | | - Pengawalan - Patroli |
| 6 | Operasional patroli | | | - Penertiban - Penaganan Unjuk rasa dan kerusuhan |
| 7 | Deteksi Dini dan Cegah Dini | | | |
| 8 | SOP Lainnya (Sebutkan) | | | |

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH SARANA DAN PRASARANA | KONDISI SARANA DAN PRASARANA | |
|-----|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Layak | Tidak Layak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MINIBUS | 3 | 1 | |
| 2 | TRUK | 3 | 1 | |
| 3 | PICK UP | 10 | 1 | |
| 4 | SEPEDA MOTOR | 17 | 1 | |
| | | | | |

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

- Kolo Diisi nomor urut
- Kolo Diisi jenis sarana dan prasarana
- Kolo Diisi jumlah sarana dan prasarana
- Kolo Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak
- Kolo Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | JUMLAH PERSONIL SATPOL PP | | | JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS | |
|-----|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------|------------------------------------|-----------|
| | | PNS | | NON PNS | PPNS | SATLINMAS |
| | | BELUM DIKLAT | SUDAH DIKLAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | JUMLAH PERDA DAN PERKADA | JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---|---------|------------|
| | | | PERDA | PERKADA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan
- Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS PENERIMA LAYANAN | JUMLAH WARGA NEGARA | JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA | | JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN |
|-----|------------------------|---------------------|--|------------------------------|---|
| | | | CIDERA RINGAN | CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pelayanan Pengobatan | 1 | 1 | | 250,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 Diisi nomor urut

Kolom 2 Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 Diisi jumlah warga negara

Kolom 4 Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera ringan

Kolom 5 Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera sedang dan/atau berat

Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN | | | JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET |
|-----|---|--|--------|-------|---|
| | | RINGAN | SEDANG | BERAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WARUNG NASI | | | | |
| 2 | WARUNG NASI KOPI | | | | |
| 3 | KIOS | | | | |
| 4 | WARUNG | | | | |
| 5 | RUMAH | | | | |

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 Diisi nomor urut
- Kolom 2 Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
- Kolom 4 Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
- Kolom 5 Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
- Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP | | | | JUMLAH KEBUTUHAN PPNS | | | | JUMLAH SATLINMAS | | |
|-----|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | | DIKLAT DASAR | DIKLAT TEKNIS LAIN | HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT | BESARAN BIAYA | EKSISTING | KEBUTUHAN | HARGA SATUAN | BESARAN BIAYA | BIMTEK | HARGA SATUAN | BESARAN BIAYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

| NO. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH SARANA DAN PRASARANA | | | HARGA SATUAN | BESARAN BIAYA |
|-----|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | EKSISTING | KEBUTUHAN | KEKURANGAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | MINIBUS | 3 | 5 | 2 | 300,000,000 | 600,000,000 |
| 2 | TRUK | 3 | 5 | 2 | 300,000,000 | 600,000,000 |
| 3 | PICK UP | 10 | 15 | 5 | 200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 4 | SEPEDA MOTOR | 17 | 20 | 3 | 15,000,000 | 45,000,000 |
| | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana

Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana

Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA :

| NO | NAMA | NIK | JENIS KELAMIN | TTL | ALAMAT | TINGGAL DI DALAM KELUARGA | HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA | NO KK | TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL) | STATUS PERKAWINAN | PEKERJAAN /SEKOLAH | JENIS DISABILITAS | KONDISI KETRE | | LANTRAAN | KET |
|------------------------|------|-----|---------------|-----|--------|---------------------------|---------------------------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | KELUARGA/MASYARAKAT/SESEORANG TIDAK MENGURUS | RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN | MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lanjut usia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gelandangan Pengemis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir
- Kolom 6 : Diisi dengan alamat
- Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tinggal di keluarga (rumah) atau tidak
- Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll
- Kolom 10 : Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan
- Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas
- Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus
- Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan
- Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

| NO | JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUHTKAN SARANA PRASARANA | JUMLAH SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | | KONDISI SARANA PRASARANA | | | TINGKAT KERUSAKAN | | |
|--|---|------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------|-----|-------------|--------------------------|------|----------------|-------------------|--------|-------|
| | | SHELTER/ RUMAH SINGGAH | PUSKESOS | CALL CENTER | KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN | TRC KETELANTARAN | DAPUR UMUM | LDP | MANAJEMEN LOGISTIK | MANAJEMEN SHELTER | KEPOSKOAN | KSB | TRC BENCANA | SANGAT BAIK | BAIK | KURANG BAIK | RENDAH | SEDANG | BERAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total sarana prasarana yang ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total sarpras yang ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah sarpras yang dibutuhkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasaena
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat kesejahteraan sosial
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana *call center*
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
 Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana
 Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---|---|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota | Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa | Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luarpanti | | RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantr, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti. Indikator |
| | | | A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis | a. Layanan data dan pengaduan | | (a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet. | RUMUS = (a x b) + c + d + e |
| | | | B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah | b. Layanan kedaruratan | | (a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat. | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d |
| | | | 1. Standar SDM | | | | Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d |
| | | | 2. Standar sarana dan prasarana | | | | Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d |
| | | | | c. Penyediaan permakanan | | (a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas. | RUMUS = (a x b x c) + d |
| | | | | d. Penyediaan sandang | | (a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian pertengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas. | RUMUS = a + b + c + d + e |
| | | | | e. Penyediaan alat bantu | | (a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; | RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j |
| | | | | f. Penyediaan perbekalan kesehatan | | (a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan. | RUMUS = a + b + c + d + f |
| | | | | g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial | | (a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas. | RUMUS = a + b + c + d |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|
| | | | h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan i. pengemis dan | | (a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas. | RUMUS = a + b + c |
| | | | j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak | | (a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan. | RUMUS = a + b |
| | | | k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | | (a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan. | RUMUS = a + b |
| | | | l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | | Biaya perjalanan pekerja sosial profesional. | Sesuai dengan standar biaya |
| | | | m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | | (a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga. | Sesuai dengan standar biaya |
| | | | n. Layanan rujukan | | (a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat. | RUMUS = a + b |

| FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|---|
| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN | DATA YANG DIBUTUHKAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota | Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa | Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota | | RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota. | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kabupaten/kota. Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti. |
| | | | A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial | a. Penyediaan permakanan | | (a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari. | RUMUS = a + b + c *a = d x e x f | Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi). |
| | | | B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi | b. Penyediaan sandang | | (a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian. | RUMUS = a + b + c *a = d x e | |
| | | | 1. Standar SDM | c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi | | (a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi. | RUMUS = a + b + c *a = d x e | |
| | | | 2. Standar sarana dan prasarana | d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan | | (a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus. | RUMUS = a + b + c *a = d x e | |
| | | | | e. Pelayanan dukungan psikososial | | (a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial | RUMUS = a + b + c *a = d x e | |

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR LUAR PANTI

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA | | | | | | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR TAHUN N + 5 | |
|----|-----------------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | | TAHUN N + 3 | | | TAHUN N + 4 | | | TAHUN N + 5 | | | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH Kabupaten/Kota

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PR | | | OGRAM PEMENUHAN PELAYAN | | | AN DASAR PENYANDANG DISAB | | | ILTAS TERLANTAR DALAM PAN | | | TI DAN KERANGKA | | | KONDISI AKHIR TAHUN N + 5 | | |
|----|-----------------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | | TAHUN N + 3 | | | TAHUN N + 4 | | | TAHUN N + 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI KABUPATEN KOTA :

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|-------------------|--------|--------|----|-----------|----|---------|----------|-------------|--------------|--------|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) form 6.C.5

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

| NO | JENIS LAYANAN DASAR | CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) | | | CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|----|-----------------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| | | JUMLAH KLAIM LUAR PANTI | POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Penyanggung Disabilitas Terlantar | | | | | | | | |
| 2 | Anak Terlantar | | | | | | | | |
| 3 | Lansia Terlantar | | | | | | | | |
| 4 | Gepeng | | | | | | | | |
| 5 | Bencana alam dan sosial | | | | | | | | |

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyanggung disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di provinsi yang membutuhkan rehabsos di dalam 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

C. Format Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TRIWULAN TAHUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009